

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

**Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019**



**Jl. Soekarno - Hatta KM. 20 Way Laga Bandar Lampung
Telp./Fax : (0721)31305 / 31544 Email : bkplampung@pertanian.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2019
Kepala Balai,

drh. Muh. Jumadh, M.Si
NIP. 196404031991031003

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I	Laporan Realisasi Anggaran	7
II	Neraca.....	8
III	Laporan Operasional	9
IV	Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
V	Catatan atas Laporan Keuangan	11
A	Penjelasan Umum	11
B	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1	Pendapatan	19
B.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
B.2	Belanja.....	20
B.2.1	Belanja Pegawai.....	22
B.2.2	Belanja Barang.....	22
B.2.3	Belanja Modal Tanah	23
B.2.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.2.5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	25
B.2.6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
C	Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	26
C.1	Aset Lancar	26
C.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan.....	26
C.1.2	Persediaan	27
C.2	Aset Tetap	27
C.2.1	Tanah	27
C.2.2	Peralatan dan Mesin	28
C.2.3	Gedung dan Bangunan	29
C.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.2.5	Aset Tetap Lainnya	30
C.2.6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	30
C.3	Aset Lainnya.....	30
C.3.1	Aset Tak Berwujud	31
C.3.2	Aset Lain-lain	32
C.3.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	32
C.4	Kewajiban Jangka Pendek.....	32
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.5	Ekuitas.....	33
C.5.1	Ekuitas.....	33
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	34
D.2	Beban Pegawai	34
D.3	Beban Persediaan.....	34
D.4	Beban Barang dan Jasa	34
D.5	Beban Pemeliharaan.....	34

D.6	Beban Perjalanan Dinas	35
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	35
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1	Ekuitas Awal	36
E.2	Surplus/Defisit-LO	37
E.3.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	37
E.3.2	Penyesuaian Nilai Aset	37
E.5	Transaksi Antar Entitas	38
E.6	Ekuitas Akhir.....	38
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1	Kejadian Setelah Tanggal Neraca	38
F.1	Pengungkapan Lain-lain.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 2. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	19
Tabel 3. Perubahan DIPA awal dan Revisi DIPA TA. 2019.....	21
Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA. 2019	22
Tabel 5. Perbandingan Reasliasi Pendapatan TA. 2019 dan 2018.....	22
Tabel 6. Rincian Pagu dan Realisasi per 31 desember 2019	23
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2019 dan 2018	23
Tabel 8. Perbandingan Belanja pegawai TA. 2019 dan 2018	24
Tabel 9. Perbandingan Belanja Barang TA. 2019 dan 2018	24
Tabel 10. Perbandingan Baelanja Modal TA. 2019 dan 2018.....	25
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2019 dan 2018	26
Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2019 dan 2018.....	26
Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal JIJ TA 2019 dan 2018	27
Tabel 14. Perbandingan Persediaan 2019 dan 2018	27
Tabel 15. Mutasi Penambahan dan Pengurangan PM 2019.....	28
Tabel 16. Mutasi Penambahan dan Pengurangan GB 2019.....	29
Tabel 16. Mutasi Penambahan dan Pengurangan JIJ 2019.....	30
Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2019.....	30
Tabel 18. Aset Tak Berwujud	30
Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	30
Tabel 20. Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga	31
Tabel 21. Perbandingan PNBP Lainnya.....	31
Tabel 22. Perbandingan Beban Pegawai.....	31
Tabel 23. Perbandingan Beban Persediaan	31
Tabel 24. Perbandingan Beban Barang dan Jasa.....	32
Tabel 25 Perbandingan Pemeliharaan.....	32
Tabel 26. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas.....	32
Tabel 27. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi	32
Tabel 28. Perbandingan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	32

Tabel 29. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	33
Tabel 30. Rincian Trnsaksi Antar Entitas	34
Tabel 31. Rincian Transfer Masuk 2019	35

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 31 Desember 2019
Kepala Balai,

drh. Muh. Jumadh, M.Si
NIP. 196404031991031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.981.909.277,00 atau mencapai 107,64% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp16.704.961.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp23.739.235.178,00 atau mencapai 99,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp23.873.474.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp52.816.513.936,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp554.624.690,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp52.231.892.246,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp29.997.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp56.191.363,00 dan Rp52.760.322.573,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.961.741.981,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.177.472.906,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.215.730.925,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-31.727.559,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.247.458.484,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp53.544.441.727,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6.247.458.484,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.463.339.330,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp52.760.322.573,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	16.704.961.000,00	17.981.909.277,00	107,64	15.638.915.312,00
Jumlah Pendapatan		16.704.961.000,00	17.981.909.277,00	107,64	15.638.915.312,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	7.539.493.000,00	7.437.925.792,00	98,65	6.785.635.867,00
Belanja Barang	B.4.	13.928.706.000,00	13.898.789.686,00	99,79	10.744.630.955,00
Belanja Modal	B.5.	2.405.275.000,00	2.402.519.700,00	99,89	2.814.658.825,00
Jumlah Belanja		23.873.474.000,00	23.739.235.178,00	99,44	20.344.925.647,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	3.193.000,00	23.360.296,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-15.965,00	-116.801,00
Persediaan	C.1.3.	551.447.655,00	648.135.274,00
Jumlah Aset Lancar		554.624.690,00	671.378.769,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	26.249.644.000,00	26.249.644.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	22.275.812.344,00	20.976.548.644,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	20.602.051.089,00	19.947.370.089,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.781.183.492,00	1.781.183.492,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-18.676.798.679,00	-16.102.109.367,00
Jumlah Aset Tetap		52.231.892.246,00	52.852.636.858,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	73.022.000,00	48.052.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-43.025.000,00	-27.019.500,00
Jumlah Aset Lainnya		29.997.000,00	21.032.500,00
Jumlah Aset		52.816.513.936,00	53.545.048.127,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	56.191.363,00	606.400,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		56.191.363,00	606.400,00
Jumlah Kewajiban		56.191.363,00	606.400,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	52.760.322.573,00	53.544.441.727,00
Jumlah Ekuitas		52.760.322.573,00	53.544.441.727,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		52.816.513.936,00	53.545.048.127,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	17.961.741.981,00	15.558.952.400,00
JUMLAH PENDAPATAN		17.961.741.981,00	15.558.952.400,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7.437.925.792,00	6.785.635.867,00
Beban Persediaan	D.3.	1.471.681.815,00	1.289.338.361,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5.776.426.825,00	4.772.264.258,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.507.982.904,00	1.761.881.247,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	5.366.065.165,00	3.235.676.439,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	2.617.491.241,00	2.809.287.607,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-100.836,00	116.801,00
JUMLAH BEBAN		24.177.472.906,00	20.654.200.580,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.215.730.925,00	-5.095.248.180,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	32.544.388,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	62.356.113,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	16.189.015,00	98.804.331,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	47.916.574,00	2.262.199,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-31.727.559,00	66.730.407,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6.247.458.484,00	-5.028.517.773,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	53.544.441.727,00	53.889.287.330,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.247.458.484,00	-5.028.517.773,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-130.770.419,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	-130.770.419,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.463.339.330,00	4.814.442.589,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	52.760.322.573,00	53.544.441.727,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung bertujuan untuk melaksanakan efektifitas dan efisiensi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Melalui peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung diharapkan mampu melindungi provinsi Lampung dari masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung berkomitmen dengan visi ***“Terwujudnya Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang tangguh, profesional dan terpercaya”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung memiliki misi sebagai berikut:

- Melindungi kelestarian sumber daya hayati hewan dan tumbuhan.
- Mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan nasional
- Memfasilitasi kelancaran perdagangan/produk agribisnis.
- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	14.086.871.000,00	14.086.871.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	2.618.090.000,00	2.618.090.000,00
Jumlah Pendapatan	16.704.961.000,00	16.704.961.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.280.539.000,00	6.882.725.000,00
Belanja Lembur	310.812.000,00	656.768.000,00
Belanja Barang Operasional	1.872.446.000,00	1.851.056.000,00
Belanja Barang Non Operasional	654.440.000,00	1.073.825.000,00
Belanja Barang Persediaan	838.856.000,00	1.304.321.000,00
Belanja Jasa	2.550.934.000,00	2.814.754.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.508.640.000,00	1.508.630.000,00

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.667.220.000,00	5.376.120.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	1.724.625.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	655.650.000,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	25.000.000,00
Jumlah Belanja	18.033.887.000,00	23.873.474.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.981.909.277,00 atau mencapai 107,64% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp16.704.961.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	1.383.880,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	2.618.090.000,00	2.841.320.000,00	108,53
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	14.086.871.000,00	15.139.205.397,00	107,47
Jumlah	16.704.961.000,00	17.981.909.277,00	107,64

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,98% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.383.880,00	34.071.772,00	-95,94
Pendapatan Jasa Lainnya	2.841.320.000,00	2.375.254.528,00	19,62
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	15.139.205.397,00	13.158.810.192,00	15,05

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Lain-lain	0,00	70.778.820,00	- 100,00
Jumlah	17.981.909.277,00	15.638.915.312,00	14,98

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp23.739.235.178,00 atau 99,44% dari anggaran belanja sebesar Rp23.873.474.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7.539.493.000,00	7.438.487.035,00	98,66
Belanja Barang	13.928.706.000,00	13.898.789.686,00	99,79
Belanja Modal	2.405.275.000,00	2.402.519.700,00	99,89
Total Belanja Kotor	23.873.474.000,00	23.739.796.421,00	99,44
Pengembalian Belanja		-561.243,00	0,00
Total Belanja	23.873.474.000,00	23.739.235.178,00	99,44

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,68% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	7.437.925.792,00	6.785.635.867,00	9,61
Belanja Barang	13.898.789.686,00	10.744.630.955,00	29,36
Belanja Modal	2.402.519.700,00	2.814.658.825,00	-14,64
Total Belanja	23.739.235.178,00	20.344.925.647,00	16,68

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.437.925.792,00 dan Rp6.785.635.867,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,61% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi masuk pegawai pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) orang pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.781.725.035,00	6.401.910.324,00	5,93
Belanja Lembur	656.762.000,00	426.053.000,00	54,15
Jumlah Belanja Kotor	7.438.487.035,00	6.827.963.324,00	8,94
Pengembalian Belanja Pegawai	-561.243,00	-42.327.457,00	-98,67
Jumlah Belanja	7.437.925.792,00	6.785.635.867,00	9,61

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.898.789.686,00 dan Rp10.744.630.955,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 29,36% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kegiatan operasional teknis dan umum di tahun 2019 hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.849.581.150,00	2.308.598.280,00	-19,88
Belanja Barang Non Operasional	1.072.100.675,00	889.768.825,00	20,49
Belanja Barang Persediaan	1.303.899.755,00	960.621.369,00	35,74
Belanja Jasa	2.799.160.037,00	1.608.324.795,00	74,04
Belanja Pemeliharaan	1.507.982.904,00	1.741.641.247,00	-13,42

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.366.065.165,00	3.235.676.439,00	65,84
Jumlah Belanja Kotor	13.898.789.686,00	10.744.630.955,00	29,36
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	13.898.789.686,00	10.744.630.955,00	29,36

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.402.519.700,00 dan Rp2.814.658.825,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -14,64% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya belanja modal berupa gedung dan bangunan di tahun 2019, hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.722.868.700,00	1.360.946.400,00	26,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	654.681.000,00	1.079.664.925,00	-39,36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	374.047.500,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	24.970.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.402.519.700,00	2.814.658.825,00	-14,64
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.402.519.700,00	2.814.658.825,00	-14,64

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.722.868.700,00 dan Rp1.360.946.400,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 26,59% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya belanja modal peralatan dan mesin guna pemenuhan sarana prasarana kantor, perbandingan tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.722.868.700,00	1.360.946.400,00	26,59
Jumlah Belanja Kotor	1.722.868.700,00	1.360.946.400,00	26,59
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.722.868.700,00	1.360.946.400,00	26,59

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp654.681.000,00 dan Rp1.079.664.925,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -39,36% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	654.681.000,00	1.079.664.925,00	-39,36
Jumlah Belanja Kotor	654.681.000,00	1.079.664.925,00	-39,36
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	654.681.000,00	1.079.664.925,00	-39,36

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.970.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	24.970.000,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.193.000,00 dan Rp23.360.296,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.193.000,00	23.360.296,00
Jumlah	3.193.000,00	23.360.296,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-15.965,00 dan Rp-116.801,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	3.193.000,00	0,005%	15.965,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp551.447.655,00 dan Rp648.135.274,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	551.447.655,00	648.135.274,00
Jumlah	551.447.655,00	648.135.274,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.249.644.000,00 dan Rp26.249.644.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.275.812.344,00 dan Rp20.976.548.644,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	20.976.548.644,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.722.868.700,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-423.605.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	22.275.812.344,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-16.878.891.298,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5.396.921.046,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Alat laboratorium KT berupa Microscope Trinocular Compound senilai Rp348.700.000
2. Alat Pengolah data senilai Rp94.447.100
3. Pengadaan Gordyn Wilker Bakauheni senilai Rp66.765.600
4. Pengadaan fasilitas perkantoran senilai Rp 116.237.000
5. Pengadaan Kendaraan Operasional sebanyak 2 unit Rp. 641.000.000
6. Pengadaan AC Split Kantor Wilker Bakauheni sebanyak 15 unit Rp. 98.934.000

7. Pengadaan alat laboratorium berupa centrifuge 1 unit, dan 2 unit showcase freezer senilai Rp. 60.995.000
8. Pengadaan PM Server 1 unit, UPS Server 1 unit dan 4 unit printer warna senilai Rp. 71.940.000
9. Pengadaan Meja rapat 2 unit, Kursi besi metal sebanyak 24 unit, lemari 1 unit dan sice/sofa 1 unit senilai Rp. 139.854.000
10. Pengadaan alat laboratorium berupa Refrigerator sebanyak 1 unit dan micro pipettes sebanyak 5 unit senilai 83.996.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Transfer Keluar Peralatan Mesin Berupa 1 unit Kendaraan roda 4 ke Sekretariat Badan Karantina Pertanian Jakarta senilai Rp187.250.000,00. (BA Terlampir)
2. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin berupa 1 unit kendaraan roda 4 ke BKP Kelas I Pekan Baru senilai Rp187.900.000,00.(BA Terlampir)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.602.051.089,00 dan Rp19.947.370.089,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	19.947.370.089,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	258.090.000,00
Pengembangan Nilai Aset	396.591.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	20.602.051.089,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1.506.655.890,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	19.095.395.199,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Pembangunan tempat parkir kendaraan R4 Kantor wilker raden inten II senilai Rp. 75.530.000
2. Pembuatan tempat parkir pengguna jasa kantor balai senilai Rp. 134.460.000
3. Pembuatan Billboard kantor balai senilai Rp. 48.100.000
4. Pembuatan ruang arsip dan sekat ruang arsip kantor balai senilai Rp. 199.131.000

5. Pembuatan sekat laboratorium KT kantor balai senilai Rp. 197.460.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.781.183.492,00 dan Rp1.781.183.492,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-18.676.798.679,00 dan Rp-16.102.109.367,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	22.275.812.344,00	-16.878.891.298,00	5.396.921.046,00
2.	Gedung dan Bangunan	20.602.051.089,00	-1.506.655.890,00	19.095.395.199,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.781.183.492,00	-143.778.553,00	1.637.404.939,00
Akumulasi Penyusutan		44.659.046.925,00	-18.676.798.679,00	25.982.248.246,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp73.022.000,00 dan Rp48.052.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	48.052.000,00
Mutasi Tambah	

Pengembangan Nilai Aset	24.970.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	73.022.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-43.025.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	29.997.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Pengembangan Web BKP Kelas I Bandar Lampung senilai Rp. 24.970.000

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	73.022.000,00
Jumlah	73.022.000,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-43.025.000,00 dan Rp-27.019.500,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	73.022.000,00	-43.025.000,00	29.997.000,00
	Akumulasi Penyusutan	73.022.000,00	-43.025.000,00	29.997.000,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp56.191.363,00 dan Rp606.400,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung per 31 Desember adalah berupa beban tagihan listrik bulan Desember 2019. Adapun rincian utang kepada pihak ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	56.191.363,00	606.400,00
Jumlah	56.191.363,00	606.400,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp52.760.322.573,00 dan Rp53.544.441.727,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.961.741.981,00 dan Rp15.558.952.400,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	15.117.868.101,00	13.182.170.488,00	14,68
Pendapatan Jasa Lainnya	2.842.490.000,00	2.375.254.528,00	19,67
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.383.880,00	1.527.384,00	-9,40
Jumlah	17.961.741.981,00	15.558.952.400,00	15,44

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.437.925.792,00 dan Rp6.785.635.867,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.671.304.500,00	4.295.594.500,00	8,75
Beban Pembulatan Gaji PNS	70.387,00	58.079,00	21,19
Beban Tunj. Anak PNS	127.361.578,00	114.922.952,00	10,82
Beban Tunj. Beras PNS	269.836.920,00	261.001.680,00	3,39
Beban Tunj. Fungsional PNS	553.230.000,00	520.650.000,00	6,26
Beban Tunj. PPh PNS	9.368.407,00	6.268.866,00	49,44
Beban Tunj. Struktural PNS	47.730.000,00	44.100.000,00	8,23
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	370.970.000,00	336.067.790,00	10,39
Beban Tunjangan Umum PNS	83.325.000,00	88.470.000,00	-5,82
Beban Uang Lembur	656.762.000,00	426.053.000,00	54,15
Beban Uang Makan PNS	647.967.000,00	692.449.000,00	-6,42
Jumlah	7.437.925.792,00	6.785.635.867,00	9,61

Kenaikan beban pegawai ditahun 2019 sebanyak 9,61 % dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan oleh adanya mutasi masuk pegawai ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebanyak 5 orang pegawai pada tahun 2019.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.471.681.815,00 dan Rp1.289.338.361,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	1.471.681.815,00	1.289.338.361,00	14,14
Jumlah	1.471.681.815,00	1.289.338.361,00	14,14

Kenaikan beban persediaan pada tahun 2019 senilai 14,14% dibandingkan tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya bahan pendukung persediaan untuk operasional tindakan karantina pertanian di sepanjang tahun 2019.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.776.426.825,00 dan Rp4.772.264.258,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	999.350.675,00	793.168.825,00	25,99
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	281.040.000,00	258.780.000,00	8,60
Beban Honor Output Kegiatan	72.750.000,00	96.600.000,00	-24,69
Beban Jasa Konsultan	27.500.000,00	87.450.000,00	-68,55
Beban Jasa Lainnya	1.206.810.124,00	208.916.766,00	477,65
Beban Jasa Profesi	126.200.000,00	81.900.000,00	54,09
Beban Keperluan Perkantoran	1.257.795.150,00	1.742.101.080,00	-27,80
Beban Langganan Air	13.687.000,00	8.364.420,00	63,63
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	650.882.000,00	624.977.988,00	4,14
Beban Langganan Listrik	536.178.972,00	402.486.061,00	33,22
Beban Langganan Telepon	30.881.904,00	24.834.118,00	24,35
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	299.362.000,00	294.622.000,00	1,61
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.384.000,00	13.095.200,00	-13,07
Beban Sewa	262.605.000,00	134.967.800,00	94,57

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Jumlah	5.776.426.825,00	4.772.264.258,00	21,04

Kenaikan beban barang dan jasa di tahun 2019 senilai 21,04% dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan oleh di tahun 2019 terdapat banyak kegiatan pendukung tupoksi karantina pertanian yang mengakibatkan meningkatnya beban bahan dan beban sewa perlengkapan kegiatan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.507.982.904,00 dan Rp1.761.881.247,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	367.625.000,00	467.973.000,00	-21,44
Beban Pemeliharaan Jaringan	96.779.500,00	273.212.250,00	-64,58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.043.578.404,00	1.020.695.997,00	2,24
Jumlah	1.507.982.904,00	1.761.881.247,00	-14,41

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.366.065.165,00 dan Rp3.235.676.439,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
--------	----------------------------	----------------------------	----------------

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.198.489.847,00	1.105.718.103,00	98,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	237.590.000,00	141.450.000,00	67,97
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	39.000.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	581.295.018,00	325.208.336,00	78,75
Beban Perjalanan Tetap	2.348.690.300,00	1.624.300.000,00	44,60
Jumlah	5.366.065.165,00	3.235.676.439,00	65,84

Kenaikan beban perjalanan dinas pada tahun 2019 senilai 65,84% dibandingkan dengan tahun 2018 hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban perjalanan berupa beban perjalanan biasa dan beban perjalanan tetap kegiatan operasional tindakan karantina pertanian.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.617.491.241,00 dan Rp2.809.287.607,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	16.005.500,00	12.013.000,00	33,23
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	521.329.488,00	504.332.792,00	3,37
Beban Penyusutan Irigasi	26.631.452,00	26.631.452,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.948.100,00	22.684.050,00	32,02
Beban Penyusutan Jaringan	50.179.689,00	43.854.983,00	14,42
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	15.938.486,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.973.397.012,00	2.183.832.844,00	-9,64
Jumlah	2.617.491.241,00	2.809.287.607,00	-6,83

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-100.836,00 dan Rp116.801,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-100.836,00	116.801,00	-186,33
Jumlah	-100.836,00	116.801,00	-186,33

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-62.356.113,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-6.227.726,00	-2.262.199,00	175,30
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-41.688.848,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	16.189.015,00	47.084.331,00	-65,62
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	32.544.388,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	51.720.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	-31.727.559,00	66.730.407,00	-147,55

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp53.544.441.727,00 dan Rp53.889.287.330,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-6.247.458.484,00 dan Rp-5.028.517.773,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-130.770.419,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-130.770.419,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.463.339.330,00 dan Rp4.814.442.589,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.739.235.178,00
Diterima dari Entitas Lain	-17.981.909.277,00
Transfer Keluar	-396.808.571,00
Transfer Masuk	102.822.000,00
Jumlah	5.463.339.330,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-17.981.909.277,00 sedangkan DKEL sebesar Rp23.739.235.178,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp102.822.000,00 yang terdiri dari dokumen utama sertifikat karantina pertanian yang berasal dari Sekretariat Barantan, KP Kelas II Cilegon dan BKP Kelas I Pontianak (BA terlampir) rincian transfer masuk dapat dilihat pada table dibawah ini:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	102.129.000,00
2.	Barang Konsumsi	018121300237881000KD	462.000,00
3.	Barang Konsumsi	018122900499480000KD	231.000,00
Jumlah			102.822.000,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-396.808.571,00 yang terdiri dari peralatan dan mesin berupa Alat Laboratorium 1 unit ke BBUSKP, 1 unit kendaraan R4 ke Sekretariat Barantan dan 1 unit kendaraan R4 ke BKP Kelas I Pekan Baru (BA terlampir). Rincian transfer keluar dapat dilihat pada table dibawah ini :

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120100649259000KD	-48.455.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	-187.250.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	13.375.000,00
4.	Peralatan dan Mesin	018120900237732000KD	-187.900.000,00
5.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018120900237732000KD	13.421.429,00
Jumlah			-396.808.571,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp52.760.322.573,00 dan Rp53.544.441.727,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Pada neraca per 31 desember 2019 terdapat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp3.193.000,00 yang terdiri dari akun 425331 senilai Rp2.023.000,00 dan akun 425699 senilai Rp1.170.00,00. Piutang PNPB ini merupakan penerimaan yang harus diterima Negara per 31 desember 2019 akan tetapi disetorkan seluruhnya pada bulan tanggal 02 januari 2020 sehingga menimbulkan beban penyisihan piutang PNPB senilai Rp15.965,00. Semua transaksi tersebut sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA, serta sudah dibuatkan memo penyesuaiannya (*terlampir*).
- Utang pada pihak ketiga pada neraca per 31 desember 2019 senilai Rp56.191.363,00 merupakan beban langganan listrik tahun 2019 yang dibayarkan pada bulan januari tahun 2020 sehingga menimbulkan belanja yang masih harus dibayar oleh satker, Semua transaksi tersebut sudah dilakukan jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA, serta sudah dibuatkan memo penyesuaiannya (*terlampir*).

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Penanggung Jawab Kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2019 :

Kuasa Pengguna Anggaran	: drh. Muh. Jumadh, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: drh. A.A. Oka Mantara
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Sujianto, SH
Bendahara Pengeluaran	: Come Gusmana, S.Si
Bendahara Penerima	: Darman, SE